



RENCANA KERJA TAHUN 2024

***DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas yaitu penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Rencana kerja tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2024. Dalam urusan Lingkungan Hidup Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan kepada masyarakat.

Palu, 20 Mei 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DR. YOPIE. M.I. PATIRO, SH., MH

Pembina Utama Muda
NIP. 197805251997031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
 BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 53
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	53
3.3 Program dan Kegiatan	55
 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 76
 BAB 5 PENUTUP	 87
 LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024. Renja OPD merupakan

dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup lebih difokuskan pada substansi kebijakan yang sesuai dengan Visi Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka mereduksi fenomena pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
5. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
39. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

42. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tanggal 17 November 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
44. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah.
45. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Sedangkan tujuan dari tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Acuan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Provinsi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan dibidang lingkungan hidup dalam tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana kerja (renja) ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan pengukuran kinerja kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
			2023	2020	2022	2022	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	62	-	-	-	-	62	0	0.00
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	-	-	-	-	3	0	0.00
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	1	-	-	-	-	1	0.5	50.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	89	-	-	-	-	89	37.98	42.67
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	-	-	-	-	63	63	100.00
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	-	-	-	-	2	1	50.00
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	-	-	-	1	1	100.00
5.1.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	-	-	-	-	100		0.00
5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	-	-	-	-	2	0	0.00
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	-	-	-	-	2	0	0.00
5.1.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	-	-	-	-	2	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24	-	-	-	-	24	10	41.67
5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	-	-	-	-	55	30	54.55
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Wajib Perencanaan Lingkungan Hidup	60	-	-	-	-	60	0	0.00
2.11.02.101	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ validasi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.02.101.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.02.102	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS Yang disusun dan diverifikasi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.02.102.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	41.67	-	-	-	-	41.67	0	0.00
2.11.03.101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11	-	-	-	-	11	0	0.00
2.11.03.101.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03.101.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup Yang dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.03.103	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi rehabilitasi dan restorasi	3	-	-	-	-	3	0	0.00
2.11.03.103.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03.103.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03.103.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dilakukan pembinaan	100	-	-	-	-	100	0	0.00
2.11.04.101	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola dan dilakukan pembinaan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.04.101.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	-	-	-	-	1	1	100.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.04.101.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.04.101.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5	-	-	-	-	5	1	20.00
2.11.04.101.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	2	-	-	-	-	2	0	0.00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	78	-	-	-	-	78	0	0.00
2.11.05.101	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	22,332.61	-	-	-	-	22,332.61	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.05.101.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.05.101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	58.23	-	-	-	-	58.23	32.91	56.52

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.06.101	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina/diawasi	92	-	-	-	-	92	52	56.52
2.11.06.101.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20	-	-	-	-	20	12	60.00
2.11.06.101.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui yang ditingkatkan kapasitasnya	100	-	-	-	-	100	0	0.00
2.11.07.101	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui	2	-	-	-	-	2	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.07.101.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.07.102	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	2	-	-	-	-	2	0	0.00
2.11.07.102.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	76.9	-	-	-	-	76.9	0	0.00
2.11.08.101	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	2	-	-	-	-	2	0	0.00
2.11.08.101.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.08.101.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.08.101.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	70.5	-	-	-	-	70.5	0	0.00
2.11.09.101	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diberikan/ dilaksanakan ditingkat Provinsi	6	-	-	-	-	6	0	0.00
2.11.09.101.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6	-	-	-	-	6	0	0.00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	100	-	-	-	-	100	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.10.101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	3	-	-	-	-	3	0	0.00
2.11.10.101.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3	-	-	-	-	3	0	0.00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	42	-	-	-	-	42	0	0.00
2.11.11.101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan dan Pengelolaan Timbulan Sampah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.11.101.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.11.101.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penganan Sampah pada Kondisi Khusus	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2.11.11.101.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.11.101.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah volume sampah dari kerjasam penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	500	-	-	-	-	500	0	0.00
UPT LABORATORIUM										
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	62	-	-	-	-	62	0	0.00
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	-	-	-	-	7	0	0.00
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	-	-	-	-	2	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	-	-	-	-	7	0	0.00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	41.67	-	-	-	-	41.67	0	0.00
2.11.03.101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03.101.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	25	-	-	-	-	25	10	40.00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka nomenklatur program dan kegiatan tahun 2022 dan 2023 mengalami perubahan dan berbeda dari nomenklatur tahun 2020.

Dari tabel diatas ada target yang belum tercapai dikarenakan pandemi dan pemangkasan anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang harus berkurang anggarannya. Namun ada juga target yang tercapai dikarenakan komitmen dan kerjasama beberapa pihak sehingga kegiatan tetap terlaksana yang berimplikasi pada realisasi capaian target kinerja output dan outcome.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu

prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2022-2023 dan Prakiraan 2024**

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun				Tahun		Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kualitas Air	55,84	65,29	65,39	65,49	55,84	0	65,39	65,49	
2	Indeks Kualitas Udara	91,33	90,38	90,49	90,59	91,33	0	90,49	90,59	
3	Indeks Kualitas Air Laut	87,36	70,62	71,21	71,81	87,36	0	71,21	71,81	
4	Emisi Gas Rumah Kaca	-	187.29 4,85	193.44 9,42	199.68 4,41	-	0	193.4 49,42	199.6 84,41	

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah, pada dasarnya kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai “*Pendukung*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishment*), dan kesejahteraan pegawai.

- b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur di bidang lingkungan hidup.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Lingkungan hidup.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan

publik, dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup.

b. Melaksanakan kegiatan yang terintegrasi satu OPD dengan yang lainnya.

5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang SPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporandan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung pengelolaan sumber daya alam dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

b. Peningkatan kegiatan yang berkualitas guna mendukung peningkatan kualitas SDA dan lingkungan hidup secara holistic.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan berdasarkan keinginan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana atau bagian yang menangani perencanaan sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan dibidang lingkungan hidup mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme kegiatan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan swasta.

Namun peningkatan kegiatan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk kegiatan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Kualitas Sumberdaya aparatur baik perencanaan dan teknis yang memiliki kompetensi khususnya di bidang lingkungan hidup relatif masih terbatas;
2. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi stakeholder (para pihak) dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini ditandai dengan masih sedikitnya kelompok peduli terhadap lingkungan, sehingga percontohan/demplot pengelolaan lingkungan belum berkembang dengan baik;
3. Keberpihakan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibanding sektor lain. Hal ini terjadi karena pengelolaan lingkungan hidup masih sebagai pelengkap pembangunan daerah dan belum dijadikan arus utama pembangunan;
4. Para pelaku usaha, pengambil kebijakan dan masyarakat sebagian besar masih beranggapan bahwa melakukan suatu proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal (biaya produksi meningkat, keuntungan berkurang dan menghambat investasi).
5. Meningkatnya aktivitas transportasi sebagai akibat dari peningkatan kegiatan ekonomi berdampak pada meningkatnya pencemaran seperti CO, Nox, HC. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini akan berbanding lurus dengan memburuknya kualitas udara;

6. Permasalahan lingkungan terutama di daerah perkotaan adalah belum dapat menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*), meningkatnya limbah cair, padat dan B3 baik domestik maupun industri, penyerobotan daerah sepadan sungai dan terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini berpengaruh pada estetika lingkungan dan ancaman pencemaran;
7. Ancaman bencana alam yang meliputi gempa bumi, tanah longsor, krisis air (kekeringan, banjir, tercemar) dan pengurasan berlebihan air tanah;
8. Belum optimalnya koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
9. Belum tersusunnya perencanaan pengelolaan lingkungan yang lengkap dan menyeluruh yang menjadi dasar penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Belum optimalnya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang lingkungan hidup;
11. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
12. Masih terbatasnya data base (basis data) dan/atau informasi lingkungan yang yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang lingkungan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara terperinci review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 jika dibandingkan dengan hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	9,663,649,537	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	11,366,783,970	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Nilai SAKIP	80 Poin	112,000,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Nilai SAKIP	80 Poin	276,020,450	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	19,145,750	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang disusun	1 Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang disusun	1 Dokumen	249,999,700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,875,000	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	90 Persen	7,817,533,767	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	90 Persen	8,669,887,782	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	6,841,533,767	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	7,344,740,697	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	946,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,299,470,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,677,085	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	14,040,700	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14,040,700	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.5 Poin	94,215,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.5 Poin	94,215,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	84,165,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	84,165,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	10,050,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	10,050,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	340,985,770	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	653,550,858	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,714,914	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	130,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	126,308,688	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,940,256	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12,600,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	168,485,770	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	489,987,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	230,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	243,713,380	
	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	44,956,980	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	198,756,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1 Laporan	260,100,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	329,347,000	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

			Umum Kantor yang Disediakan					yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	165,100,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	309,672,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19,675,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	873,030,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1,086,008,800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	330,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	389,852,600	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	43,030,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	43,030,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/Rehabilitasi	1 Unit	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/Rehabilitasi	1 Unit	653,126,200	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen	550,000,000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen	574,252,550	
	Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Persentase Dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan	100 Persen	50,000,000	Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Persentase Dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan	100 Persen	65,398,750	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kab. Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Kota Palu	Jumlah Kab/kota yang diawasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 Kab/Kota	50,000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kab. Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Kota Palu	Jumlah Kab/kota yang diawasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 Kab/Kota	65,398,750	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Persentase Dokumen KLHS Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan	100 Persen	500,000,000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Persentase Dokumen KLHS Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan	100 Persen	508,853,800	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Palu	Presentase penyelesaian usulan Dokumen KLHS (RTRW/RDTR/RPJMD/RPJPD/KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup)Kabupaten/Kota yang tervalidasi	100 Persen	500,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Palu	Presentase penyelesaian usulan Dokumen KLHS (RTRW/RDTR/RPJMD/RPJPD/KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup)Kabupaten/Kota yang tervalidasi	100 Persen	508,853,800	
			Jumlah Dokumen KLHS (RPJMD) Provinsi yang tersusun	1 Dokumen				Jumlah Dokumen KLHS (RPJMD) Provinsi yang tersusun	1 Dokumen		
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter S02 dan N02	0.1 Persen	400,000,000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter S02 dan N02	0.1 Persen	647,529,110	
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH3 dan P04-P	0.1 Persen				Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH3 dan P04-P	0.1 Persen		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

			Persentase Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	100 Persen				Persentase Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	100 Persen		
			Persentase Peningkatan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Laut	100 Persen				Persentase Peningkatan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Laut	100 Persen		
			Persentase penurunan konsentrasi Parameter PH, DO, BOD, COD, TSS, NO3,-N, T-Phospat, Fecal Coli	0.1 Persen				Persentase penurunan konsentrasi Parameter PH, DO, BOD, COD, TSS, NO3,-N, T-Phospat, Fecal Coli	0.1 Persen		
			Persentase Peningkatan Kampung Iklim	100 Persen				Persentase Peningkatan Kampung Iklim	100 Persen		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan Passive Sampler	100 Persen	150,000,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan Passive Sampler	100 Persen	339,199,400	
			Persentase Data Kualitas Air Laut	100 Persen				Persentase Data Kualitas Air Laut	100 Persen		
			Persentase Kualitas Data Hasil Pemantauan Air Danau & Sungai	100 Persen				Persentase Kualitas Data Hasil Pemantauan Air Danau & Sungai	100 Persen		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

			Persentase Peningkatan Kampung Iklim yang dibina di Sulawesi Tengah	100 Persen				Persentase Peningkatan Kampung Iklim yang dibina di Sulawesi Tengah	100 Persen		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Morowali, Poso, Parigi Moutong	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler	13 Kab/Kota	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Morowali, Poso, Parigi Moutong	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler	13 Kab/Kota	241,820,000	
			Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode AQMS	1 Kota				Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode AQMS	1 Kota		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi, Kota Palu	Jumlah Calon Kampung Iklim yang dibina	20 Lokasi	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi, Kota Palu	Jumlah calon kampung iklim yang dibina	20 Lokasi	97,379,400	
			Jumlah Kabupaten Kota yang terinventarisasi GRK di Sulawesi Tengah	13 Kab/Kota				Jumlah Kabupaten Kota yang terinventarisasi GRK di Sulawesi Tengah	13 Kab/Kota		
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase rehabilitasi dan restorasi kerusakan pesisir dan laut	100 Persen	70,000,000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase rehabilitasi dan restorasi kerusakan pesisir dan laut	100 Persen	45,734,710	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi rehabilitasi mangrove	60 Orang	70,000,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi rehabilitasi mangrove	60 Orang	45,734,710	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase rehabilitasi dan reklamasi lahan tambang yang dilakukan pelaku usaha	100 Persen	180,000,000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase rehabilitasi dan reklamasi lahan tambang yang dilakukan pelaku usaha	100 Persen	262,595,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Banggai	Jumlah Lokasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	7 Kab/Kota	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Banggai	Jumlah Lokasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	7 Kab/Kota	52,350,000	
	Pelaksanaan Restorasi	13 Kab/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan Kerusakan Pesisir dan Laut	13 Kab/Kota	30,000,000	Pelaksanaan Restorasi	13 Kab/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan Kerusakan Pesisir dan Laut	13 Kab/Kota	160,254,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Banggai, Morowali, Poso	Jumlah Pelaku Usaha yang Terpantau	40 Pelaku Usaha	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Banggai, Morowali, Poso	Jumlah Pelaku Usaha yang Terpantau	40 Pelaku Usaha	49,991,000	
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100 Persen	105,000,000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100 Persen	99,999,800	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Persentase Kualitas Taman Kehati	100 Persen	105,000,000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Persentase Kualitas Taman Kehati	100 Persen	99,999,800	
	Pengelolaan Tanam Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan	13 Kab/Kota	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati diluar kawasan hutan yang dikelola dan dilakukan	13 Kab/Kota	80,000,000	Pengelolaan Tanam Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan	13 Kab/Kota	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati diluar kawasan hutan yang dikelola dan dilakukan	13 Kab/Kota	50,000,050	
	Pengembangan Kapasitas Kelembangan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13 Kab/Kota	Jumlah Kab/kota yang dibina	13 Kab/Kota	25,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembangan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13 Kab/Kota	Jumlah Kab/kota yang dibina	13 Kab/Kota	49,999,750	
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)		Persentase Pelaku Usaha yang Mengelola B3 dan LB3 sesuai Ketentuan	60 Persen	100,000,000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)		Persentase Pelaku Usaha yang Mengelola B3 dan LB3 sesuai Ketentuan	60 Persen	135,044,750	
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 & non B3	60 Persen	100,000,000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 & non B3	60 Persen	135,044,750	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan dengan Pemerintah Pusat Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,	13 Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Terawasi	80 Pelaku Usaha	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan dengan Pemerintah Pusat Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,	13 Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Terawasi	80 Pelaku Usaha	135,044,750	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Pengelolaan dan/atau Penimbunan					Pengelolaan dan/atau Penimbunan					
			Jumlah Pelaku Usaha yang Terbina	80 Pelaku Usaha			Jumlah Pelaku Usaha yang Terbina	80 Pelaku Usaha			
			Jumlah Kebijakan yang tersusun	1 Kebijakan			Jumlah Kebijakan yang tersusun	1 Kebijakan			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase Dokumen Lingkungan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang sesuai ketentuan	100 Persen	200,000,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase Dokumen Lingkungan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang sesuai ketentuan	100 Persen	233,668,200	
			Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap Hukum Lingkungan	50 Persen				Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap Hukum Lingkungan	50 Persen		
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Dokumen Lingkungan yang diuji Untuk Memperoleh Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	100 Persen	200,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Dokumen Lingkungan yang diuji Untuk Memperoleh Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	100 Persen	233,668,200	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

			Persentase Pelaku Usaha yang Taat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	28.6 Persen				Persentase Pelaku Usaha yang Taat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	28,6 Persen		
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Palu	Persentase Dokumen lingkungan sebagai syarat izin usaha yang teruji	100 Persen	50,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Palu	Persentase Dokumen lingkungan sebagai syarat izin usaha yang teruji	100 Persen	23,142,450	
			Jumlah kab/kota yang terevaluasi	4 Kab/Kota				Jumlah kab/kota yang terevaluasi	4 Kab/Kota		
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13 Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terawasi terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup	50 Pelaku Usaha	150,000,000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13 Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terawasi terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup	50 Pelaku Usaha	210,525,750	
			Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terbina terhadap Persetujuan Lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup	53 Pelaku Usaha				Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terbina terhadap Persetujuan Lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup	53 Pelaku Usaha		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH		Persentase status Masyarakat Hukum Adat di kab/kota	21 Persen	40,000,000	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH		Persentase status Masyarakat Hukum Adat di kab/kota	21 Persen	39,999,850	
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA yang diakui	21 Persen	40,000,000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA yang diakui	21 Persen	39,999,850	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Keafifan Lakol Pengetahuan Tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara	Jumlah profil lembaga masyarakat hukum adat	2 Profil	40,000,000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Keafifan Lakol Pengetahuan Tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara	Jumlah profil lembaga masyarakat hukum adat	2 Profil	39,999,850	
			Jumlah lembaga MHA yang didampingi	5 MHA				Jumlah lembaga MHA yang didampingi	5 MHA		
			Jumlah pendampingan pengakuan dan perlindungan calon MHA	5 MHA				Jumlah pendampingan pengakuan dan perlindungan calon MHA	5 MHA		
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase kelompok lingkungan yang aktif	75 Persen	150,000,000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase kelompok lingkungan yang aktif	75 Persen	149,423,700	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3	150,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3	149,423,700	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Palu, Kab. Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Morowali Utara	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah Adiwiyata Mandiri/ Sekolah Adiwiyata Nasional / Sekolah Adiwiyata Provinsi)	20 Sekolah	115,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Palu, Kab. Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Morowali Utara	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah Adiwiyata Mandiri/ Sekolah Adiwiyata Nasional / Sekolah Adiwiyata Provinsi)	20 Sekolah	104,423,950	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kota Palu	Jumlah penyuluhan dan kampanye penggiat lingkungan di Sulawesi Tengah	2 Kegiatan	25,000,000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kota Palu	Jumlah penyuluhan dan kampanye penggiat lingkungan di Sulawesi Tengah	2 Kegiatan	24,999,950	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Palu	Jumlah keluarga yang menerapkan PRLH (Perilaku Ramah Lingkungan Hidup)	3 Keluarga	10,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Palu	Jumlah keluarga yang menerapkan PRLH (Perilaku Ramah Lingkungan Hidup)	3 Keluarga	10,000,000	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Kota Palu	Jumlah komunitas/kelompok yang terbina terkait Bank Sampah	7 Kelompok	10,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Kota Palu	Jumlah komunitas/kelompok yang terbina terkait Bank Sampah	7 Kelompok	9,999,800	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

			Jumlah orang yang mengikuti PRAMUKA SAKA KALPATARU	30 Orang				Jumlah orang yang mengikuti PRAMUKA SAKA KALPATARU	30 Orang		
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	45 Persen	35,000,000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	45 Persen	35,000,500	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Peningkatan Event Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	45 Persen	35,000,000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Peningkatan Event Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	45 Persen	35,000,500	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Kota Palu	Jumlah individu/komunitas penggiat lingkungan hidup yang dibina (Kalpataru)	8 Orang/ Komunitas	35,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Kota Palu	Jumlah individu/komunitas penggiat lingkungan hidup yang dibina (Kalpataru)	8 Orang/ Komunitas	35,000,500	
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	100 Persen	50,000,000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	100 Persen	45,938,300	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	100 Persen	50,000,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	100 Persen	45,938,300	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	13 Kab/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Lingkungan di luar Pengadilan	100 Persen	50,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	13 Kab/Kota	Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan di luar pengadilan	100 Persen	45,938,300	
			Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Sulawesi tengah yang ditindaklanjuti	100 Persen				Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Sulawesi tengah yang ditindaklanjuti	100 Persen		
11	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah di Kab/Kota	44 Persen	85,000,000	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah di Kab/Kota	44 Persen	312,058,450	
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase Pelaporan Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota	100 Persen	85,000,000	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase Pelaporan Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota	100 Persen	312,058,450	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan TPA	13 Kab/Kota	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan TPA	13 Kab/Kota	100,000,100	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Jakstrada Kabupaten/Kota	13 Kab/Kota	20,000,000	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Jakstrada Kabupaten/Kota	13 Kab/Kota	52,561,750	
	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Poso, Kota Palu	Jumlah Kab/Kota yang melakukan penanganan sampah bila terjadi kondisi khusus	5 Kab/Kota	20,000,000	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Poso, Kota Palu	Jumlah Kab/Kota yang melakukan penanganan sampah bila terjadi kondisi khusus	5 Kab/Kota	75,059,700	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	Jumlah laporan evaluasi kinerja kab/kota yang di evaluasi/dilakukan pembinaan/pemantauan Adipura	5 Kab/Kota	45,000,000	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	Jumlah laporan evaluasi kinerja kab/kota yang di evaluasi/dilakukan pembinaan/pemantauan Adipura	5 Kab/Kota	84,436,900	
	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP					UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	246,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	511,710,558	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	40,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	213,885,359	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	191,741,559	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22,143,800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	22,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	27,875,200	
	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22,273,200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,602,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	120,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91,679,999	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	120,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	91,679,999	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	64,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		178,270,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75,600,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	24,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	96,920,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/Rehabilitasi	1 Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/Rehabilitasi	1 Unit	5,750,000	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT LH	90 Persen	75,000,000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT LH	90 Persen	177,089,548	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase permohonan pengujian sampel yang tertangani	100 Persen	75,000,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase permohonan pengujian sampel yang tertangani	100 Persen	177,089,548	
			Persentase pegawai yang meningkat kompetensinya	100 Persen				Persentase pegawai yang meningkat kompetensinya	100 Persen		
			Persentase pemenuhan syarat akreditasi	100 Persen				Persentase pemenuhan syarat akreditasi	100 Persen		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	13 Kab/Kota	Persentase permohonan pengujian contoh uji air dan udara pada UPT Laboratorium LH	60 Persen	75,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	13 Kab/Kota	Persentase permohonan pengujian contoh uji air dan udara pada UPT Laboratorium LH	60 Persen	177,089,548	
			Jumlah personil/petugas yang tersertifikasi	1 Orang				Jumlah personil/petugas yang tersertifikasi	1 Orang		
			Jumlah pengelola laboratorium pada UPT Laboratorium LH Provinsi & Kab/kota yang dilatih	25 Orang				Jumlah pengelola laboratorium pada UPT Laboratorium LH Provinsi & Kab/kota yang dilatih	25 Orang		
			Jumlah parameter yang lulus uji profisiensi	3 Parameter				Jumlah parameter yang lulus uji profisiensi	3 Parameter		

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pelaksanaan musrenbang kecamatan (bila sudah dilakukan).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan usulan dari masyarakat dalam kegiatan MUSRENBANG yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup. Adapun usulan-usulan dalam MUSRENBANG tersebut antara lain: pembuatan tong sampah, dump truk sampah dan pengadaan kendaraan sampah. Semua usulan-usulan tersebut diakomodir dan akan dilakukan dengan skala prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.

**Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Usulan : Pengadaan dump truk sampah, kendaraan sampah di Kota Palu, Banggai, Buol, Tolitoli				Usulan Kabupaten/Kota dalam Forum OPD

2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Usulan : Pemantauan kualitas air sungai dan air laut di Kab. Morowali Utara				Usulan Kabupaten/Kota dalam Forum OPD

BAB 3

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan program yang diselaraskan dengan kebijakan nasional tentang penanganan pemanasan global dan penanganan efek Gas Rumah Kaca (GRK) serta Program Nasional Menuju Indonesia Hijau (MIH). Untuk pelaksanaan program tersebut di aplikasikan dalam bentuk kegiatan pengelolaan kehati dan ekosistem serta pembangunan, penataan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk kebijakan nasional tentang penanganan pencemaran dengan target terukur pada media air dan udara sebesar 50%, terkelolanya limbah B3, serta target terlihat yaitu seluruh kabupaten dan kota dapat diukur kualitas lingkungannya dalam indeks yang *dipercaya masyarakat*, data kualitas air dan udara daerah yang lengkap serta data pengawasan kegiatan potensi merusak seperti pertambangan serta data lahan kritis, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah akan mewujudkannya dalam kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim serta dalam bentuk kegiatan-kegiatan berupa pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan (*objectives*) merupakan penjabaran dari pernyataan misi, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan juga bisa diartikan sebagai penjabaran yang lebih spesifik, namun belum bisa diukur, dari *apa yang ingin sebenarnya dicapai dengan menjalankan misi* yang telah

ditetapkan. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa apabila tujuan telah tercapai maka dengan sendirinya misi juga telah dicapai.

Tujuan utama (*main objectives*) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu *mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas*. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan beberapa tujuan khusus atau sub tujuan (*specific objectives*) yaitu;

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau dan teduh.
2. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (kualitas air dan udara).
3. Meningkatkan (cakupan) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Mengoptimalkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
5. Menciptakan rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam
6. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Meningkatkan pengendalian polusi
8. Meningkatkan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi hutan, pesisir dan laut.
9. Meningkatkan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
10. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau.
11. Meningkatkan pengendalian kerusakan ekosistem dan konservasi keanekaragaman hayati dengan mempertahankan tutupan hutan Sulawesi Tengah.
12. Meningkatkan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
13. Meningkatkan penegakkan hukum lingkungan.
14. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan.

15. Meningkatkan kapasitas penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
16. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan utama diatas, perlu dirumuskan sasaran. Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur (*measurable*) yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran utama (*main goal*) Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu terwujudnya harmonisasi *Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan*. Indikator pencapaian sasaran utama ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Penurunan Emisi GRK.

Sementara itu, penetapan indikator kinerja sasaran (tingkat manfaat) mempertimbangkan kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah karena keberhasilannya dipengaruhi oleh dukungan program dan kegiatan dari OPD/instansi lain dan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran-sasaran khusus tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti instansi kehutanan pusat dan daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi dan masyarakat. Penyusunan indikator kinerja sasaran memperhatikan hirarki indikator antara sasaran, program dan kegiatan.

3.3 Program Dan Kegiatan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, Urusan Lingkungan Hidup disertai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan 10 Program teknis dengan 13 kegiatan teknis, yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1.3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 3.1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - 3.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 4.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 5.1 Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - 6.1 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

- 7.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- 8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
- 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 9.1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
- 10. Program Pengelolaan Persampahan.
 - 10.1 Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

**Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tengah**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		66 Poin	11,366,783,970	APBD		68 Poin	13,068,850,316
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP		80 Poin	276,020,450	APBD		81 Poin	317,423,518
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	19,145,750	APBD		3 Dokumen	22,017,613
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	249,999,700	APBD		1 Dokumen	287,499,655
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	6,875,000	APBD		1 Dokumen	7,906,250

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		90 Persen	8,669,887,782	APBD		92 Persen	9,970,370,949
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	65 Orang	7,344,740,697	APBD		65 Orang	8,446,451,802
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	1 Dokumen	1,299,470,000	APBD		1 Dokumen	1,494,390,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	25,677,085	APBD		1 Laporan	29,528,648
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	14,040,700	APBD		1 Laporan	16,146,805
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	14,040,700	APBD		1 Laporan	16,146,805
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		88.5 Poin	94,215,000	APBD		88.5 Poin	108,347,250
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palu	1 Dokumen	84,165,000	APBD		1 Dokumen	96,789,750
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	30 Orang	10,050,000	APBD		30 Orang	11,557,500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1 Laporan	653,550,858	APBD		1 Laporan	751,583,487

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	5,714,914	APBD		1 Paket	6,572,151
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	126,308,688	APBD		1 Paket	145,254,991
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	18,940,256	APBD		1 Paket	21,781,294
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 Dokumen	12,600,000	APBD		1 Dokumen	14,490,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	1 Laporan	489,987,000	APBD		1 Laporan	563,485,050
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	243,713,380	APBD		1 Laporan	280,270,387
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	44,956,980	APBD		1 Paket	51,700,527
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	20 Unit	198,756,400	APBD		20 Unit	228,569,860
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	329,347,000	APBD		1 Laporan	375,797,800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	1 Laporan	309,672,000	APBD		1 Laporan	356,122,800

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Laporan	19,675,000	APBD		1 Laporan	19,675,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Laporan	1,086,008,800	APBD		1 Laporan	1,248,910,120
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	7 Unit	389,852,600	APBD		7 Unit	448,330,490
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	45 Unit	43,030,000	APBD		45 Unit	49,484,500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/Rehabilitasi	Kota Palu	1 Unit	653,126,200	APBD		1 Unit	751,095,130
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		100 Persen	574,252,550	APBD		100 Persen	660,390,433
Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan		100 Persen	65,398,750	APBD		100 Persen	75,208,563
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Kab/kota yang diawasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kab. Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Kota Palu	3 Kab/Kota	65,398,750	APBD		3 Kab/Kota	75,208,563
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Dokumen KLHS Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan		100 Persen	508,853,800	APBD		100 Persen	585,181,870

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Presentase penyelesaian usulan Dokumen KLHS (RTRW/RDTR/RPJMD/RPJPJ/ KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup)Kabupaten/Kota yang tervalidasi	Kota Palu	100 Persen	508,853,800	APBD		100 Persen	585,181,870
	Jumlah Dokumen KLHS (RPJMD) Provinsi yang tersusun		1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 dan NO2		0.1 Persen	647,529,110	APBD		0.1 Persen	744,658,477
	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N- NH3 dan PO4-P		0.1 Persen		APBD		0.1 Persen	
	Persentase Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan		100 Persen		APBD		100 Persen	
	Persentase Peningkatan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Laut		100 Persen		APBD		100 Persen	
	Persentase penurunan konsentrasi Parameter PH, DO, BOD, COD, TSS, NO3,-N, T-Phospat, Fecal Coli		0.1 Persen		APBD		0.1 Persen	
	Persentase Peningkatan Kampung Iklim		100 Persen		APBD		100 Persen	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan Passive Sampler		100 Persen	339,199,400	APBD		100 Persen	390,079,310
	Persentase Data Kualitas Air Laut		100 Persen		APBD		100 Persen	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Persentase Kualitas Data Hasil Pemantauan Air Danau & Sungai		100 Persen		APBD		100 Persen	
	Persentase Peningkatan Kampung Iklim yang dibina di Sulawesi Tengah		100 Persen		APBD		100 Persen	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler	Kab. Morowali, Poso, Parigi Moutong	13 Kab/Kota	241,820,000	APBD		13 Kab/Kota	278,093,000
	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode AQMS		1 Kota		APBD		1 Kota	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah calon kampung iklim yang dibina	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi, Kota Palu	20 Lokasi	97,379,400	APBD		20 Lokasi	111,986,310
	Jumlah Kabupaten Kota yang terinventarisasi GRK di Sulawesi Tengah		13 Kab/Kota		APBD		13 Kab/Kota	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase rehabilitasi dan restorasi kerusakan pesisir dan laut		100 Persen	45,734,710	APBD		100 Persen	52,594,917
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi rehabilitasi mangrove	Kab. Morowali	60 Orang	45,734,710	APBD		60 Orang	52,594,917
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase rehabilitasi dan reklamasi lahan tambang yang dilakukan pelaku usaha		100 Persen	262,595,000	APBD		100 Persen	301,984,250
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Lokasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Kab. Banggai	7 Kab/Kota	52,350,000	APBD		7 Kab/Kota	60,202,500

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Lokasi Pemantauan Kerusakan Pesisir dan Laut	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	160,254,000	APBD		13 Kab/Kota	184,292,100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Terpantau	Kab. Banggai, Morowali, Poso	40 Pelaku Usaha	49,991,000	APBD		40 Pelaku Usaha	57,489,650
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		100 Persen	99,999,800	APBD		100 Persen	114,999,770
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Kualitas Taman Kehati		100 Persen	99,999,800	APBD		100 Persen	114,999,770
Pengelolaan Tanam Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati diluar kawasan hutan yang dikelola dan dilakukan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	50,000,050	APBD		13 Kab/Kota	57,500,058
Pengembangan Kapasitas Kelembangan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kab/kota yang dibina	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	49,999,750	APBD		13 Kab/Kota	57,499,713
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang Mengelola B3 dan LB3 sesuai Ketentuan		60 Persen	135,044,750	APBD		60 Persen	155,301,463
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 & non B3		60 Persen	135,044,750	APBD		60 Persen	155,301,463
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan dengan Pemerintah Pusat Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Jumlah Pelaku Usaha yang Terawasi	13 Kab/Kota	80 Pelaku Usaha	135,044,750	APBD		80 Pelaku Usaha	155,301,463

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Jumlah Pelaku Usaha yang Terbina		80 Pelaku Usaha		APBD		80 Pelaku Usaha	
	Jumlah Kebijakan yang tersusun		1 Kebijakan		APBD		1 Kebijakan	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Dokumen Lingkungan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang sesuai ketentuan		100 Persen	233,668,200	APBD		100 Persen	268,718,430
	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap Hukum Lingkungan		50 Persen		APBD		50 Persen	
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Dokumen Lingkungan yang diuji Untuk Memperoleh Rekomendasi Kelayakan Lingkungan		100 Persen	233,668,200	APBD		100 Persen	268,718,430
	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup		28,6 Persen		APBD		28,6 Persen	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Dokumen lingkungan sebagai syarat izin usaha yang teruji	Kota Palu	100 Persen	23,142,450	APBD		100 Persen	26,613,818
	Jumlah kab/kota yang terevaluasi		4 Kab/Kota		APBD		4 Kab/Kota	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terawasi terhadap persetujuan Lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup	13 Kab/Kota	50 Pelaku Usaha	210,525,750	APBD		50 Pelaku Usaha	242,104,613

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terbina terhadap Persetujuan Lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup		53 Pelaku Usaha		APBD		53 Pelaku Usaha	
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH	Persentase status Masyarakat Hukum Adat di kab/kota		21 Persen	39,999,850	APBD		21 Persen	45,999,828
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui		21 Persen	39,999,850	APBD		21 Persen	45,999,828
Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Keafifan Lakol Pengetahuan Tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	Jumlah profil lembaga masyarakat hukum adat	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara	2 Profil	39,999,850	APBD		2 Profil	45,999,828
	Jumlah lembaga MHA yang didampingi		5 MHA		APBD		5 MHA	
	Jumlah pendampingan pengakuan dan perlindungan calon MHA		5 MHA				5 MHA	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok lingkungan yang aktif		75 Persen	149,423,700	APBD		75 Persen	171,837,255
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		3	149,423,700	APBD		3	171,837,255

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah Adiwiyata Mandiri/ Sekolah Adiwiyata Nasional / Sekolah Adiwiyata Provinsi)	Kota Palu, Kab. Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Morowali Utara	20 Sekolah	104,423,950	APBD		20 Sekolah	120,087,543
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyuluhan dan kampanye penggiat Lingkungan di Sulawesi Tengah	Kota Palu	2 Kegiatan	24,999,950	APBD		2 Kegiatan	28,749,943
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumah keluarga yang menerapkan PRLH (Perilaku Ramah Lingkungan Hidup)	Kota Palu	3 Keluarga	10,000,000	APBD		3 Keluarga	11,500,000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah komunitas/kelompok yang terbina terkait Bank Sampah	Kota Palu	7 Kelompok	9,999,800	APBD		7 Kelompok	11,499,770
	Jumlah orang yang mengikuti PRAMUKA SAKA KALPATARU		30 Orang		APBD		30 Orang	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup		45 Persen	35,000,500	APBD		45 Persen	40,250,575
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Event Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		45 Persen	35,000,500	APBD		45 Persen	40,250,575
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah individu/komunitas penggiat lingkungan hidup yang dibina (Kalpataru)	Kab. Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Kota Palu	8 Orang/ Komunitas	35,000,500	APBD		8 Orang/ Komunitas	40,250,575

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan		100 Persen	45,938,300	APBD		100 Persen	52,829,045
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani		100 Persen	45,938,300	APBD		100 Persen	52,829,045
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provins	Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan di luar pengadilan	13 Kab/Kota	100 Persen	45,938,300	APBD		100 Persen	52,829,045
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Sulawesi tengah yang ditindaklanjuti		100 Persen		APBD		100 Persen	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah di Kab/Kota		44 Persen	312,058,450	APBD		44 Persen	358,867,218
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Pelaporan Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota		100 Persen	312,058,450	APBD		100 Persen	358,867,218
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Laporan Pemantauan TPA	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100,000,100	APBD		13 Kab/Kota	115,000,115
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Penilaian Jakstrada Kabupaten/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	52,561,750	APBD		13 Kab/Kota	60,446,013

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Kab/Kota yang melakukan penanganan sampah bila terjadi kondisi khusus	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Poso, Kota Palu	5 Kab/Kota	75,059,700	APBD		5 Kab/Kota	86,318,655
Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah laporan evaluasi kinerja kab/kota yang di evaluasi/dilakukan pembinaan/pemantauan Adipura	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	5 Kab/Kota	84,436,900	APBD		5 Kab/Kota	97,102,435
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP					APBD			
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		66 Poin	511,710,558	APBD		66 Poin	588,467,142
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Kota Palu	1 Laporan	213,885,359	APBD		1 Laporan	245,968,163
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	191,741,559	APBD		1 Paket	220,502,793
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	22,143,800	APBD		1 Paket	25,465,370
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Laporan	27,875,200	APBD		1 Laporan	32,056,480
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	22,273,200	APBD		1 Paket	25,614,180
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	2 Unit	5,602,000	APBD		2 Unit	6,442,300
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91,679,999	APBD			105,431,999

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	1 Laporan	91,679,999	APBD		1 Laporan	105,431,999
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178,270,000	APBD			205,010,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	2 Unit	75,600,000	APBD		2 Unit	86,940,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	7 Unit	96,920,000	APBD		7 Unit	111,458,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/Rehabilitasi	Kota Palu	1 Unit	5,750,000	APBD		1 Unit	6,612,500
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT LH		90 Persen	177,089,548	APBD		90 Persen	203,652,980
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase permohonan pengujian sampel yang tertangani		100 Persen	177,089,548	APBD		100 Persen	203,652,980
	Persentase pegawai yang meningkat kompetensinya		100 Persen		APBD		100 Persen	
	Persentase pemenuhan syarat akreditasi		100 Persen		APBD		100 Persen	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase permohonan pengujian contoh uji air dan udara pada UPT Laboratorium LH	13 Kab/Kota	60 Persen	177,089,548	APBD		60 Persen	203,652,980
	Jumlah personil/petugas yang tersertifikasi		1 Orang		APBD		1 Orang	

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Jumlah pengelola laboratorium pada UPT Laboratorium LH Provinsi & Kab/kota yang dilatih		25 Orang		APBD		25 Orang	
	Jumlah parameter yang lulus uji profisiensi		3 Parameter		APBD		3 Parameter	

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana kerja dan pendanaan DLH Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2024			
			Target	Rp		
4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		66 Poin	11,366,783,970	Dinas Lingkungan hidup	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP		80 Poin	276,020,450		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	19,145,750		Kota Palu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang disusun		1 Dokumen	249,999,700		Kota Palu
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	6,875,000		Kota Palu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		90 Persen	8,669,887,782		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 Orang	7,344,740,697		Kota Palu

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1,299,470,000		Kota Palu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	25,677,085		Kota Palu
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	14,040,700		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	14,040,700		Kota Palu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		88.5 Poin	94,215,000		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	84,165,000		Kota Palu
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		30 Orang	10,050,000		Kota Palu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1 Laporan	653,550,858		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5,714,914		Kota Palu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	126,308,688		Kota Palu
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	18,940,256		Kota Palu

RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12,600,000		Kota Palu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	489,987,000		Kota Palu
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	243,713,380		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	44,956,980		Kota Palu
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	198,756,400		Kota Palu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	329,347,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	309,672,000		Kota Palu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19,675,000		Kota Palu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1,086,008,800		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	389,852,600		Kota Palu
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	43,030,000		Kota Palu

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/Rehabilitasi		1 Unit	653,126,200		Kota Palu
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		100 Persen	574,252,550		
Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan		100 Persen	65,398,750		
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Kab/kota yang diawasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		3 Kab/Kota	65,398,750		Kab. Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Kota Palu
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Dokumen KLHS Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan		100 Persen	508,853,800		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Presentase penyelesaian usulan Dokumen KLHS (RTRW/RDTR/RPJMD/RPJPD/ KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup)Kabupaten/ Kota yang tervalidasi		100 Persen	508,853,800		Kota Palu
	Jumlah Dokumen KLHS (RPJMD) Provinsi yang tersusun		1 Dokumen			
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 dan NO2		0.1 Persen	647,529,110		

	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH3 dan PO4-P		0.1 Persen			
	Persentase Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan		100 Persen			
	Persentase Peningkatan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Laut		100 Persen			
	Persentase penurunan konsentrasi parameter PH, DO, BOD, COD, TSS, NO3,-N, T-Phospat, Fecal Coli		0.1 Persen			
	Persentase Peningkatan Kampung Iklim		100 Persen			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan Passive Sampler		100 Persen	339,199,400		
	Persentase Data Kualitas Air Laut		100 Persen			
	Persentase Kualitas Data Hasil Pemantauan Air Danau & Sungai		100 Persen			
	Persentase Peningkatan Kampung Iklim yang dibina di Sulawesi Tengah		100 Persen			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler		13 Kab/Kota	241,820,000		Kab. Morowali, Poso, Parigi Moutong
	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode AQMS		1 Kota			

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah calon kampung iklim yang dibina		20 Lokasi	97,379,400		Kab. Banggai Kepulauan, Sigi, Kota Palu
	Jumlah Kabupaten Kota yang terinventarisasi GRK di Sulawesi Tengah		13 Kab/Kota			
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase rehabilitasi dan restorasi kerusakan pesisir dan laut		100 Persen	45,734,710		
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi rehabilitasi mangrove		60 Orang	45,734,710		Kab. Morowali
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase rehabilitasi dan reklamasi lahan tambang yang dilakukan pelaku usaha		100 Persen	262,595,000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Lokasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara		7 Kab/Kota	52,350,000		Kab. Banggai
Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Lokasi Pemantauan Kerusakan Pesisir dan Laut		13 Kab/Kota	160,254,000		13 Kab/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Terpantau		40 Pelaku Usaha	49,991,000		Kab. Banggai, Morowali, Poso
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		100 Persen	99,999,800		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Kualitas Taman Kehati		100 Persen	99,999,800		
Pengelolaan Tanam Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati diluar kawasan hutan yang dikelola dan dilakukan		13 Kab/Kota	50,000,050		13 Kab/Kota

Pengembangan Kapasitas Kelembangan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kab/kota yang dibina	13 Kab/Kota	49,999,750		13 Kab/Kota
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang Mengelola B3 dan LB3 sesuai Ketentuan	60 Persen	135,044,750		
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 & non B3	60 Persen	135,044,750		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan dengan Pemerintah Pusat Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Jumlah Pelaku Usaha yang Terawasi	80 Pelaku Usaha	135,044,750		13 Kab/Kota
	Jumlah Pelaku Usaha yang Terbina	80 Pelaku Usaha			
	Jumlah Kebijakan yang tersusun	1 Kebijakan			
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Dokumen Lingkungan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang sesuai ketentuan	100 Persen	233,668,200		
	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap Hukum Lingkungan	50 Persen			
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Dokumen Lingkungan yang diuji Untuk Memperoleh Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	100 Persen	233,668,200		

	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup		28,6 Persen			
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Dokumen lingkungan sebagai syarat izin usaha yang teruji		100 Persen	23,142,450		Kota Palu
	Jumlah kab/kota yang terevaluasi		4 Kab/Kota			
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terawasi terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup		50 Pelaku Usaha	210,525,750		13 Kab/Kota
	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terbina terhadap Persetujuan Lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup		53 Pelaku Usaha			
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH	Persentase status Masyarakat Hukum Adat di kab/kota		21 Persen	39,999,850		
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui		21 Persen	39,999,850		
Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Keafifan Lakol Pengetahuan Tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	Jumlah profil lembaga masyarakat hukum adat		2 Profil	39,999,850		Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

	Jumlah lembaga MHA yang didampingi		5 MHA			
	Jumlah pendampingan pengakuan dan perlindungan calon MHA		5 MHA			
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok lingkungan yang aktif		75 Persen	149,423,700		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		3	149,423,700		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah Adiwiyata Mandiri/ Sekolah Adiwiyata Nasional / Sekolah Adiwiyata Provinsi)		20 Sekolah	104,423,950		Kota Palu, Kab. Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Morowali Utara
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyuluhan dan kampanye penggiat lingkungan di Sulawesi Tengah		2 Kegiatan	24,999,950		Kota Palu
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang menerapkan PRLH (Perilaku Ramah Lingkungan Hidup)		3 Keluarga	10,000,000		Kota Palu
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah komunitas/kelompok yang terbina terkait Bank Sampah		7 Kelompok	9,999,800		Kota Palu
	Jumlah orang yang mengikuti PRAMUKA SAKA KALPATARU		30 Orang			
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup		45 Persen	35,000,500		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Event Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		45 Persen	35,000,500		
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah individu/komunitas penggiat lingkungan hidup yang dibina (Kalpataru)		8 Orang/ Komunitas	35,000,500		Kab. Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Kota Palu
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan		100 Persen	45,938,300		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani		100 Persen	45,938,300		
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provins	Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan di luar pengadilan		100 Persen	45,938,300		13 Kab/Kota
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Sulawesi tengah yang ditindaklanjuti		100 Persen			
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah di Kab/Kota		44 Persen	312,058,450		
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Pelaporan Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota		100 Persen	312,058,450		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Laporan Pemantauan TPA		13 Kab/Kota	100,000,100		13 Kab/Kota

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Penilaian Jakstrada Kabupaten/Kota	13 Kab/Kota	52,561,750		13 Kab/Kota
Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Kab/Kota yang melakukan penanganan sampah bila terjadi kondisi khusus	5 Kab/Kota	75,059,700		Kab. Donggala , Parigi Moutong, Sigi, Poso, Kota Palu
Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah laporan evaluasi kinerja kab/kota yang di evaluasi/ dilakukan pembinaan/ pemantauan Adipura	5 Kab/Kota	84,436,900		Kab. Donggala , Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP					
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	511,710,558		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	213,885,359		Kota Palu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	191,741,559		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22,143,800		Kota Palu
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	27,875,200		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22,273,200		Kota Palu
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,602,000		Kota Palu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91,679,999		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	91,679,999		Kota Palu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178,270,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Unit	75,600,000		Kota Palu
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 Unit	96,920,000		Kota Palu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi		1 Unit	5,750,000		Kota Palu
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT LH		90 Persen	177,089,548		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase permohonan pengujian sampel yang tertangani		100 Persen	177,089,548		
	Persentase pegawai yang meningkat kompetensinya		100 Persen			
	Persentase pemenuhan syarat akreditasi		100 Persen			
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase permohonan pengujian contoh uji air dan udara pada UPT Laboratorium LH		60 Persen	177,089,548		13 Kab/Kota
	Jumlah personil/petugas yang tersertifikasi		1 Orang			

	Jumlah pengelola laboratorium pada UPT Laboratorium LH Provinsi & Kab/kota yang dilatih		25 Orang			
	Jumlah parameter yang lulus uji profisiensi		3 Parameter			

BAB 5

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development*) yang ramah lingkungan (*environmentally sound*), dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada pelestarian lingkungan benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.